



INKLUSI SOLUSI PENDIDIKAN TANPA DISKRIMINASI

Topik : Tantangan Dan Harapan dalam Optimalisasi
Pendidikan Inklusi

Oleh :
ANISSAA ALHAQQOH DARWIS, S.Pd

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2016**

INKLUSI SOLUSI PENDIDIKAN TANPA DISKRIMINASI

Topik : Tantangan Dan Harapan dalam Optimalisasi Pendidikan Inklusi

Pengantar

Mengapa penyandang disabilitas harus diperlakukan sama dan disertakan dalam pendidikan bersama anak lain pada umumnya padahal mereka memiliki kemampuan yang sangat berbeda/terbatas, kita tidak mungkin mengharapkan mereka jadi dokter bukan?

Sebuah pertanyaan yang sangat marginalisasi dan menggelitik namun sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan tersebut terkadang bukan datang dari kalangan yang berpendidikan rendah bahkan juga berasal dari keluarga terdekat; seolah mereka tidak memahami bahwa cita-cita yang saya upayakan dengan sungguh-sungguh selama ini sebagai seorang guru bagi penyandang disabilitas itu. Untuk itu kemudian saya sering “terpaksa” harus mengulang-ulang penjelasan yang mungkin saja kurang menarik sehingga didengar sepintas lalu setelah itu dilupakan begitu saja. Namun dengan ekspektasi bahwa penjelasan tersebut mampu diterima akal sehingga pendengar memiliki kepedulian serta memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas tersebut. Dan jawaban pertanyaan tersebut biasanya saya awali dengan pertanyaan pula : *“Bukankah indah apabila hidup didunia yang sama dalam keadaan menerima dan diterima?”*

Perlu difahami oleh semua pihak bahwa tidak ada seorangpun guru yang berharap selamanya siswa tetap menjadi siswa. Demikian pula halnya dengan guru bagi penyandang disabilitas. Kekhawatiran utama bagi penulis khususnya adalah suatu saat nanti siswa akan lepas dari sekolah. Pada saat itu mereka akan memasuki lingkungan sebagai masyarakat dewasa, yang seharusnya produktif. Tentu mereka akan

canggung memasuki dunia yang baru tersebut dan apakah lingkungan menerima keterbatasan mereka?.

Karena itu pencaanangan pendidikan inklusif oleh pemerintah harus diapresiasi, sebab dengan demikian penyandang disabilitas dapat memperoleh hak azazi yang hakiki dalam pendidikan. Dan ini bersesuaian dengan Deklarasi Universal tentang Hak Azazi Manusia tahun 1949 bahwa pendidikan inklusif merupakan inti dari hak azazi manusia dalam memperoleh pendidikan. Begitu pentingnya sehingga UNESCO (1994) menegaskannya kembali sebagai berikut : *kesamaan kepentingan adalah hak anak untuk tidak didiskriminiasikan, dinyatakan dalam pasal 2 dari Konvensi tentang hak anak. Konsekuensi logik dari hak ini adalah bahwa semua anak mempunyai hak untuk menerima jenis pendidikan yang tidak mendiskriminasikan pada latar dari ketidakmampuan, etnik, agama, bahasa, jender, kapabilitas dan lain sebagainya.*

Lebih lanjut dalam Deklarasi Bandung (2004) dinyatakan bahwa "...akan menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerjasama yang sinergis dan produktif antara pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat". Disamping itu, kemudian di tegaskan lagi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam BAB IV Bagian Keempat Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Namun demikian, terlepas dari semua aturan perundang-undangan, konvensi, ataupun deklarasi tersebut, inti dari pendidikan inklusi adalah proses pembelajaran bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menerima perbedaan, dan pemerintah mengakomodir hal itu. "*Bukankah indah*

apabila hidup didunia yang sama dalam keadaan menerima dan diterima?"

Permasalahan

Pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia diterima dengan cukup baik sehingga mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan namun belum dapat maksimal. Berbagai masalah yang timbul menyebabkan kemerosotan dalam implementasinya. Berkenaan dengan hal tersebut, berikut ini beberapa pendapat tentang permasalahan pelaksanaan pendidikan inklusi. Sunardi (2009), terhadap 12 sekolah penyelenggara inklusi di Kabupaten dan Kota Bandung, secara umum saat ini terdapat lima kelompok issue dan permasalahan pendidikan inklusi di tingkat sekolah yang perlu dicermati dan diantisipasi agar tidak menghambat, implementasinya tidak bisa, atau bahkan menggagalkan pendidikan inklusi itu sendiri, yaitu : pemahaman dan implementasinya, kebijakan sekolah, proses pembelajaran, kondisi guru, dan *support system*. Salah satu bagian penting dari *support system* adalah tentang penyiapan anak.

Lebih lanjut, Dika (2010) juga mengungkapkan hambatan dalam implementasi pendidikan inklusi yaitu kurikulum yang tersusun kaku dan kurang tanggap terhadap kebutuhan anak yang berbeda, kebijakan yang kurang mendukung, kurangnya ketersediaan anggaran, dukungan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, paradigma/pandangan masyarakat terhadap pendidikan inklusi.

Beberapa tahun kemudian, rakor PKLK (2016) juga menyampaikan hasil evaluasi terhadap program pendidikan inklusi yaitu belum semua propinsi, kabupaten/kota di Indonesia memiliki perda/surat edaran khusus tentang pelaksanaan pendidikan inklusif; kurangnya komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan inklusif; sebagian besar komite sekolah belum berperan aktif untuk mendukung implementasi

pendidikan inklusif; organisasi-organisasi profesi yang terkait dengan ABK belum berperan secara aktif; sebagian besar perguruan tinggi belum berperan aktif; terbatasnya jumlah guru pembimbing khusus/guru kunjung dari sekolah khusus terdekat ke sekolah inklusi; pemahaman kepala sekolah, guru, serta pengambil kebijakan masih terbatas; SDM yang ada di sekolah inklusif sebagian besar mengalami kesulitan dalam melakukan modifikasi kurikulum maupun asesmen akademik dan non akademik ABK; sistem penerimaan siswa baru yang tidak memberi kuota untuk ABK sehingga menyulitkan untuk diterima di sekolah reguler; sebagian besar sekolah belum memiliki ruang layanan khusus; sebagian besar orang tua dan masyarakat berpendapat bahwa anak cacat sebaiknya bersekolah di sekolah khusus ([http: www.pk-lk...html](http://www.pk-lk...html)).

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya negara kita mengalami permasalahan yang relatif sama dari tahun ke tahun dalam implementasi pendidikan inklusi, hal ini berimplikasi terhadap pelaksanaannya yang tidak maksimal.

Namun demikian, pendidikan inklusi sangat bermanfaat. Tidak hanya bagi si anak namun berdampak pula bagi masyarakat. Dan dampak yang paling esensial adalah sekolah inklusi mengajarkan nilai sosial berupa kesetaraan. Untuk itu, pendidikan inklusi tetap harus dilanjutkan dengan berbagai program atau pelayanan yang lebih baik disertai dukungan penuh dari semua pihak.

Salah satu upaya yang cukup efektif untuk mengurangi bahkan menghilangkan permasalahan tersebut adalah mencontoh implementasi pendidikan inklusi dari negara lain yang lebih dahulu dan berhasil, kita dapat belajar bagaimana menyikapi permasalahan yang kemungkinan juga terjadi di negara tersebut, untuk itu saya mengambil contoh dari Australia. Dengan menggunakan prinsip ATM (ambil, tiru

dan modifikasi); jika tidak memungkinkan untuk melakukan studi secara langsung maka kita dapat menggunakan cara yang lain yaitu menggunakan internet serta literatur-literatur dari berbagai bahasa sebagai media jitu pencaharian model serta program yang mendukung untuk kemudian ditiru dengan modifikasi agar dapat diterapkan di negara kita.

Pembahasan dan Solusi

Undang-undang tegas sebagai solusi efektif. Queensland Parents for People with a Disability (QPPD), menemukan bahwa lebih dari sepertiga dari 179 orang tua yang disurvei, menunjukkan bahwa mereka tidak dapat mengakses pendidikan atas dasar kesempatan yang sama dan tidak di sekolah pilihan mereka. Dalam laporan tersebut dikemukakan bahwa beberapa orang tua diarahkan ke kelas terpisah atau sekolah segregasi, respon negatif oleh sekolah bahwa beberapa orang tua lebih suka untuk menghadiri, orang tua harus membuat upaya besar untuk mendaftarkan anaknya di sekolah reguler, kurangnya dukungan dan keahlian di sekolah reguler, beberapa siswa hanya diizinkan untuk berpartisipasi dalam kelas reguler paruh waktu, sekolah dengan program pendidikan khusus lebih mungkin untuk mengecualikan anak-anak cacat dari kelas reguler, beberapa siswa tidak mengikuti kurikulum pada kelas yang sama, perlakuan tidak pantas dari guru seperti penolakan terhadap partisipasi siswa disabilitas, dan ketidakpuasan dengan hasil siswa dan inklusi sosial di sekolah.

Developmental Disability Council of Western Australia (NICD) mengadakan forum khusus tentang pendidikan di 2011 berjudul 'Orang tua sebagai Mitra dalam Pendidikan'. Forum ini diselenggarakan dalam menanggapi kurangnya perhatian pemerintah federal terhadap upaya komunikasi dengan orang tua dari siswa penyandang cacat. Disamping itu, pengalaman umum diungkapkan oleh keluarga adalah kurangnya dukungan untuk anak-anak mereka di sekolah reguler. Keluarga

merasa bahwa mereka memiliki sedikit pilihan tetapi bahkan ada usaha untuk menyingkirkan anak-anak mereka dari sekolah reguler untuk kemudian menempatkan mereka dalam kelas terpisah atau sekolah segregasi.

Dengan gencarnya upaya penghapusan diskriminasi dalam pendidikan tersebut, pemerintah Australia memberlakukan Disability Discrimination Act (DDA) pada tahun 1992. Bahwa diskriminasi disabilitas dalam pendidikan adalah melanggar hukum. DDA secara eksplisit menyatakan bahwa: diskriminasi terhadap orang lain atas dasar kecacatan merupakan pelanggaran hukum, menolak aplikasi seseorang untuk masuk sebagai mahasiswa atas dasar kecacatan merupakan pelanggaran hukum, menyangkal atau membatasi akses siswa oleh otoritas pendidikan merupakan pelanggaran hukum.

Pada tahun 2005 parlemen Australia menyetujui standar pelaksanaan pendidikan seperti yang tercantum dalam DDA. Menurut Dokumen Penjelasan diajukan di parlemen; tujuan utama dari Standar adalah untuk mengklarifikasi, dan membuat lebih eksplisit, kewajiban penyelenggara pendidikan dan layanan pelatihan di bawah DDA dan hak-hak penyandang cacat dalam kaitannya dengan pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Australia dalam pelaksanaan inklusi serta solusi efektif yang diberikan tersebut, kita dapat belajar bahwa sebuah penolakan dan upaya diskriminasi dapat diatasi dengan kerja sama yang baik oleh berbagai elemen dalam masyarakat. Solusi yang ditawarkan cukup efektif untuk memberikan efek jera terhadap pelaku diskriminasi. Seandainya solusi semacam ini dapat diterapkan di negara kita.

Menjalin komunikasi dan interaksi positif dengan berbagai pihak terkait. Adam dan Beau's adalah saudara kembar dengan down syndrom dari kota kecil di North Coast, New South Wales, Australia. Sebagaimana kota kecil di Indonesia, di North Coast pun tidak terdapat berbagai layanan khusus untuk saudara kembar ini. Namun orang tua berperan sangat aktif untuk memberikan intervensi dini terhadap anaknya. Pada usia 4 tahun, Adam dan Beau's sekolah reguler di Taman Kanak-kanak (TK) berjarak 30 km dari rumah. Di sekolah tersebut, keduanya berkembang dengan baik. Mereka belajar hal-hal baru dan bermain dengan anak lainnya. Dalam waktu yang bersamaan, mereka juga mengikuti unit layanan khusus bagi anak dengan intelektual disabilitas yang berjarak 20 km dari TK. Keduanya mengalami situasi yang mainstream; pada unit layanan khusus mereka menerima terapi dari *Departement of Community Services/DOCS* (=departemen sosial.red) disamping itu penanganan juga dari *Community Health*(=puskesmas.red). Meskipun berkembang dengan baik, keadaan ini sangat melelahkan keduanya. Untuk itu, kemudian orang tua berupaya menyampaikan hal ini ke komite di sekolah lokal, agar dapat membantu mereka mengatasi masalah tersebut. Komite sekolah menyarankan supaya sekolah menerima Adam dan Beau's dan menyediakan sesi khusus bagi mereka untuk terapi dari unit layanan khusus. Kemudian orang tua menemui berbagai pihak seperti staff sekolah, konselor, dan *Departement of Education* (=Departemen Pendidikan). Dan setahun kemudian, mereka mulai sekolah dengan parsial integrasi (Voices: Adam and Beau's Story, Proud parents, Jhon and Narelle).

Kita dapat belajar dari kisah tersebut. Berawal dari sikap orang tua yang menerima dan mendukung anak sepenuhnya itu, sehingga mampu membuka hati orang lain untuk turut membantu usahanya. Memang, integrasi butuh perjuangan. Hikmah lain yang dapat dipetik dari kisah Adam dan Beau's adalah pentingnya menjalin kerjasama yang baik antar lembaga. Pihak pemerintahpun melalui beberapa departemennya tanpa

diskriminasi telah memberi peluang bagi perkembangan yang lebih baik. Melalui kisah ini diketahui pula bahwa pihak sekolah berkoordinasi dengan komite sekolah, kedua belah pihak saling memberi dan menerima masukan yang diberikan.

Kolaborasi dan penerimaan. Evatt Primary School (EPS) adalah salah satu contoh pelaksanaan inklusi yang maju dengan model integrasi di sekolah reguler. Sekolah ini melaksanakan program pengembangan sikap dan keterampilan sejak tahun 1993. Menurut Carol Patrick, salah seorang guru di EPS, Inklusi akan terlaksana dengan baik apabila seluruh komponen sekolah menerima; mulai dari kepegawaian yang memiliki kemauan untuk mengembangkan kemampuan profesionalitas, perencanaan dan pengajaran yang kolaboratif, pelaksanaan manajemen perilaku yang konsisten, dan ekspektasi realistis dari para guru dan siswa. EPS melayani 340 siswa termasuk 14 orang siswa yang membutuhkan layanan ekstra dari guru pendidikan khusus dan asistennya. Level dan tipe layanan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa melalui proses kolaborasi melibatkan orang tua, guru, dan tenaga profesional lainnya.

Program individual tersebut dibuat untuk menentukan strategi pelayanan dan output pembelajaran sehingga mudah dinilai dan dilaporkan. Siswa dalam program ini diakui sebagai bagian dari kurikulum oleh anggota kelas yang lain. Guru khusus dan asistennya diatur sedemikian rupa untuk dapat bekerja dalam berbagai situasi termasuk di *Learning Support Centre*. Tempat dimana sumber daya siswa dikembangkan dengan baik, siswa reguler berkumpul dengan siswa khusus, berbagi keterampilan dan pengalaman (Voices: Carol Patrick, Special Education Teacher, Evatt Primary School, ACT).

Program pengajaran di Evatt Primary School memperkaya pengetahuan kita tentang pelaksanaan inklusi. Bahwa esensi dari program inklusi ini

adalah kolaborasi dan penerimaan. Karena keberhasilan tidak akan dapat dicapai tanpa kerja sama dan sikap menerima. Sekolah ini juga membiasakan siswa dengan sebuah peraturan yang dapat membentuk sikap tanpa diskriminasi.

Selain itu, EPS sangat memperhatikan perbedaan kebutuhan individu. Sehingga penting bagi mereka merencanakan dan melaksanakan sesuatu secara kolaborasi. Jadi, tidak berpedoman kepada kurikulum melainkan pada kemampuan siswa. Dan pihak sekolah dengan seluruh komponennya menjadi satu tim solid dalam upaya pelayanan siswa khusus di sekolahnya.

Proses transisi untuk memudahkan pelayanan di sekolah reguler.

Robbie didiagnosa mengalami *Attention Defisit Hiperactive Disorder* (ADHD), salah satu tipe autisme yang impulsif. Diagnosa tersebut sangat mengejutkan orang tua sehingga berupaya keras untuk memperoleh dukungan dan bantuan intervensi terhadap kondisi tersebut. Atas rekomendasi dari tenaga ahli yang terkait, Robbie dibiarkan selama 5 tahun 10 bulan di rumah. Dan mulai menjalani proses transisi selama 9 bulan di Sekolah Negeri di bawah Departemen Pendidikan. Disamping itu, orang tua diberikan pelatihan tentang cara mengintervensi dini kepada anaknya.

Melalui proses yang cukup panjang, akhirnya setelah mengikuti program di sekolah transisi Robbie dapat diterima di sekolah reguler terdekat. Dan saat memasuki sekolah reguler tersebut, Robbie lebih tenang, kebiasaan buruknya seperti menggigit jauh berkurang. Sekolahpun membuat kebijakan yang lebih memihak kepada siswa berkebutuhan khusus (voices: Robbie's Transition to School, Mary; Robbie's Mother).

Proses transisi yang diberikan kepada Robbie sangat bermanfaat bagi pendidikan selanjutnya. Dengan demikian, siswa dengan kebutuhan khusus tidak serta merta masuk ke sekolah reguler sehingga dapat menimbulkan masalah baru bagi siswa dan lingkungannya yang baru.

Melalui proses transisi, siswa telah dipersiapkan untuk memasuki lingkungan bersama siswa reguler lain. Begitu pula guru di sekolah reguler lebih mudah untuk memahami siswa melalui rujukan dari sekolah transisi sehingga tidak salah dalam pemberian layanan serta pemilihan metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

Proses transisi semacam ini, sangat baik diterapkan di negara kita. Melalui pelaksanaannya, diharapkan semua pihak lebih dapat menerima karena siswa telah dipersiapkan untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan barunya.

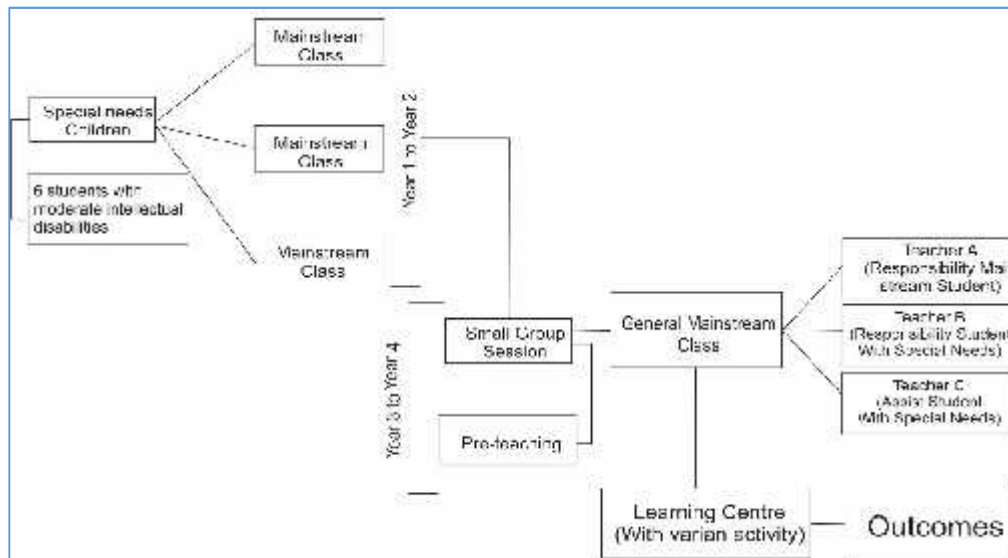
Penggunaan desain pembelajaran yang tepat. Program integrasi di Jesmond Primary School (JPS) telah di uji coba dan di evaluasi dalam berbagai bentuk pada sebuah kelas yang terdiri dari 6 orang siswa dengan keterbatasan intelektual sedang. Program ini sangat efektif untuk semua siswa dan guru dalam memaksimalkan pembelajaran dan merupakan praktek terbaik pelaksanaan pendidikan inklusi. Anak berkebutuhan khusus dengan perbedaan usia 2-4 tahun dimasukkan dalam kelas yang sama, masing-masing 2 orang dalam satu kelas. Pada dasarnya program dibagi menjadi dua aspek, yakni lingkungan belajar dalam kelompok kecil dan keseluruhan kelas. Setiap lingkungan belajar memiliki tujuan dan hasil pembelajaran yang spesifik. Pada tahun ketiga, dua sesi digunakan untuk integrasi ke kelas mainstream.

Pada masa ini, guru kelas mainstream (guru A), guru pendidikan khusus (guru B), dan asisten guru yang mendampingi selama pembelajaran. Guru A bertanggungjawab dalam penilaian dan pelaporan pada siswa mainstream. Guru B untuk siswa berkebutuhan khusus, sedangkan guru C terutama untuk membantu siswa dengan kebutuhan khusus namun tetap membantu siswa lain jika diperlukan. Demikian pula dengan perencanaan pembelajaran individual yang dikembangkan melalui konsultasi dengan semua pihak yang terlibat dengan pendidikan siswa.

Tugas pada kelompok kecil setiap pagi adalah pra-pembelajaran terhadap kemampuan dan materi yang akan dilakukan pada kelas mainstream. Kegiatan semacam ini memberi kesempatan bagi guru pendidikan khusus terutama pada pengembangan kemampuan sosial dan pelaksanaan dalam bertingkah laku sesuai kelasnya. Sebagian besar siswa dengan kebutuhan khusus memiliki gangguan berat dalam berbahasa, dalam setting kelompok kecil siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan untuk berbicara, berbahasa, dan kemampuan literasi yang akan dipraktekkan dengan benar sesuai kebutuhan siswa dan dalam kelompok ini disediakan waktu kunjung bagi terapi bicara.

Aktivitas di kelas mainstream didesain sedemikian rupa sehingga menjadi pusat belajar. Artinya, siswa dapat bekerja pada level kemampuan, termasuk pula siswa dengan kebutuhan khusus. Contoh, selama pelajaran matematika siswa di atur menjadi kelompok-kelompok paralel. Secara keseluruhan, pembelajaran bertujuan mengembangkan kemampuan berhitung dengan menggunakan tabel perbandingan, kartu angka, bangun matematika (MAB) dan dadu. Beberapa siswa dapat menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan dalam jual beli menggunakan MABs, siswa lainnya mungkin dengan memasang objek dan memilih kartu angka. Hal terpenting dari Pusat Belajar ini bahwa siswa mencapai target keberhasilan dalam aktivitasnya dan mengalami perkembangan rasa percaya diri didepan teman-temannya. Sementara itu, guru B dan guru C membantu siswa, mereka dapat memilih teman untuk membantunya mengerjakan tugas dan mengarahkannya (Prepared by Michelle Clark, Jesmond Primary School).

Desain model pembelajaran efektif ini dapat ditampilkan dengan diagram berikut :



Gambar 2.1 Desain Pembelajaran Integrasi dengan Kolaborasi

Praktek integrasi di JPS ini dinyatakan terbaik dalam pelaksanaan inklusi di Australia dan telah melalui uji coba dan evaluasi bertahun-tahun. Pembelajaran terintegrasi dengan menggunakan berbagai model inklusi ini mungkin dapat kita adopsi melalui modifikasi yang disesuaikan dengan situasi pendidikan di negara kita.

Publikasi keberhasilan. Hai. Aku Tim, lahir dengan cerebral palsy. Otakku mengalami kerusakan sehingga tidak dapat mengendalikan gerakan tangan dan kaki. Ketika masih kecil, aku memulai sekolah di Unit Khusus. Aku sama sekali tidak keberatan berada dalam unit tersebut. Namun, ketika aku mulai besar aku sedih berada di sana karena membuatku merasa sebagai orang cacat yang tidak dapat berbuat sesuatu. Memang aku cacat, tapi aku yakin dapat melakukan banyak hal. Aku bisa membaca, mengendarai sepeda roda tiga, menggunakan internet, main game di komputer, dan menonton telly. Aku masuk dalam grup paduan suara dan dapat mengarang cerita. Aku juga bisa memasak, drama, dan penggemar

musik lokal-kami mengerjakan *Joseph and the Amazing Technicolour Dream Coat* dan memiliki nilai jual-dua kali! Suatu saat nanti aku akan menjadi penulis cerita anak dan aktor televisi dan mungkin menjadi anggota band. Aku ingin menikah dan mempunyai seorang anak kemudian melakukan perjalanan sendiri, khususnya ke Inggris dan melakukan banyak hal seperti orang lain.

Ketika aku memasuki sekolah biasa, guruku yang baru membuat segalanya lebih mudah sebab beliau sangat ramah dan memperlakukanku sama dengan yang lain. Aku mendapat bantuan dari teman. Dia membantuku mengerjakan sesuatu dengan benar. Terkadang anak-anak menertawakan tulisanku-karena aneh dan lucu. Tulisanku sekarang lebih baik tapi masih menggunakan laptop di SMA.

Dengan berjalannya waktu, aku menjadi orang yang populer. Sebagian besar teman dan guru menghargaiiku dan aku memiliki banyak teman. Kupikir sekolah mainstream semacam ini lebih baik karena kamu tidak berbeda dengan yang lain (Voices: Tim's Story, True Story of My Life told by Tim).

Mempublikasikan output pembelajaran yang dianggap berhasil dalam implementasi pendidikan inklusi berperan penting dalam mengubah opini publik. Kisah keberhasilan seperti yang diceritakan Tim dapat memberi motivasi luar biasa bagi siswa berkebutuhan khusus lainnya, selain itu juga memberikan harapan baru bagi orang tua. Kisah-kisah keberhasilan siswa dengan kebutuhan khusus di sekolah reguler akan berdampak baik terhadap penerimaan masyarakat.

Beberapa contoh permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di Australia tersebut tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang terjadi di Indonesia. Namun, kegigihan serta kesungguhan pemerintah Australia menggerakkan seluruh lembaganya

untuk menghapus diskriminasi dalam pendidikan berimplikasi terhadap penerimaan masyarakat. Dan pada saat ini, berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan inklusi oleh Departemen Pendidikan Australia diperoleh kesimpulan berupa *zero-rejection* atau tidak ada penolakan terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di negeri tersebut (<https://www.aracy.org.au...html>). Maka ketika anak dengan kebutuhan khusus mendaftar di sekolah reguler, siswa lalu diterima dan dilibatkan dalam semua aktivitas belajar serta kegiatan yang sesuai dengan kemampuannya.

Kesimpulan dan Harapan

Berangkat dari pengalaman negara tetangga ini, kita dapat mengadopsinya ke dalam program pelaksanaan pendidikan inklusi di negara kita. Mengingat permasalahan yang relatif sama dialami sebelumnya, kesimpulan yang dapat diperoleh sebagai solusi pemecahan masalah pelaksanaan pendidikan inklusi adalah membuat undang-undang yang tegas disertai dengan sanksi yang jelas sehingga tidak ada upaya untuk menolak, menjalin komunikasi dan interaksi positif dengan berbagai pihak terkait demi keberhasilan program pendidikan, berkolaborasi dalam melaksanakan layanan pendidikan dan penerimaan oleh seluruh komponen sekolah, melaksanakan proses transisi sebelum memasuki sekolah reguler untuk menyiapkan siswa memasuki lingkungan yang baru; dengan demikian mempermudah pelayanan selanjutnya di sekolah reguler, menggunakan desain pembelajaran yang tepat sehingga tujuan dapat dicapai sesuai sasaran dan kebutuhan, mempublikasikan keberhasilan dari pendidikan inklusi untuk mengubah pandangan negatif terhadap anak dengan kebutuhan khusus.

Melalui pembahasan yang cukup panjang, akhirnya penulis ingin menyampaikan sebuah harapan tentang pelaksanaan inklusi bahwa semoga pemerintah kita diberikan kekuatan serta keberanian menghadapi semua masalah untuk kemudian mengambil keputusan terbaik sebagai solusi dari permasalahan tersebut.

Pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia merupakan suatu keputusan tepat sebagai upaya pemenuhan hak azazi bagi siswa disabilitas dalam pendidikan, maka itu saya berharap dapat terlibat langsung untuk menyukseskan pelaksanaannya. Dengan bersungguh-sungguh sambil menggandeng semua pihak yang terkait. Selain itu, kita dapat pula belajar dari pengalaman negara lain, bagaimana cara orang tua dan pemerintah menghapus penolakan terhadap pendidikan inklusi di Australia.

Semoga pendidikan inklusi benar-benar menjadi solusi bagi pendidikan disabilitas, untuk menghapus diskriminasi.

Daftar Pustaka

<https://www.pk-lk...html>. 2016. Hasil Rakor PKLK 2016.

<https://www.aracy.org.au...html>. 2013. *Inclusive Education for Students With Disabilities..*

Dika. 2010. Pendidikan Inklusi, (Online). Available at: <http://dika96.wordpress.com/2010/11/29/pendidikan-inklusi/>. Diakses pada tanggal 14 November 2012. Firdaus, Endis. Pendidikan Inklusif dan Implementasinya di Indonesia. Disampaikan dalam Seminar Nasional Pendidikan di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto, 24 Januari 2010.

Foreman, Phil. 2001. *Integration and Inclusion in Action 2nd Edition*. Australia, Canada : Nelson Thomson Learning. Pg.71-73; 81-83; 143-145.

Milsom, A. (2006). *Creating Positive School Experiences for Students with Disabilities. Professional School Counseling Journal , October 2006, 10(1), 66-72*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANISSAA ALHAQQOH DARWIS, S.Pd**

NIP : 197508162003122011

NUPTK : 4148753654300013

Jabatan : Guru

Judul Naskah Simposium : *Inklusi Solusi Pendidikan Tanpa Diskriminasi*

Menyatakan bahwa naskah lomba tersebut seluruhnya asli hasil kerja sendiri, bukan plagiat, dan belum pernah dinilai pada lomba lainnya, baik didalam maupun diluar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bontang, 17 November 2016

Mengetahui

Kepala Sekolah,



SYAMSU RIZAL

NIP.196202161984091002

Peserta Simposium,



ANISSAA ALHAQQOH DARWIS, S.Pd

NIP. 197508162003122011